

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu : (1) pembangunan ekonomi subagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita; (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana, 2000:24). Namun sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat luas, tujuan dasar pembangunan ekonomi tidaklah semata-mata hanya untuk mengejar pertumbuhan PDB atau PDRB, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar masyarakat. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat juga merupakan permasalahan pembangunan (Arsyad, 1997:37).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudarajad Kuncoro, 2004:39). Oleh karena itu agar pembangunan ekonomi yang dijalankan dapat mengakomodasikan persoalan-persoalan yang dihadapi daerah dengan efektif dan efisien maka strategi pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada karakteristik

yang dimiliki daerah terutama menyangkut bagaimana mendayagunakan potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan lokal baik yang formal maupun non formal.

Lincoln Arsyad (1999), menyatakan pembangunan ekonomi daerah mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada sehingga bisa menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik maka akan mendorong peningkatan pembangunan nasional (Arsyad, 1999:108).

Kebijakan pembangunan daerah di Indonesia sendiri di dasarkan atas karakteristik sosial ekonomi dari beberapa daerah. Hal ini di karenakan masing-masing daerah memiliki perbedaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang di dukung oleh kondisi geografis dan sumber daya yang ada, dengan pemanfaatan secara maksimal dari masing-masing potensi ekonomi serta terintegrasi dengan baik terhadap regulasi (kebijakan) yang berlaku di harapkan mampu mengurangi berbagai masalah dalam pembangunan, di antaranya masalah kemiskinan, ketimpangan dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi dan tingkat pengangguran.

Kesenjangan pendapatan telah lama menjadi persoalan pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang. Menurut Lincoln Arsyad (1997) banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi

tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Karena apa yang disebut dengan proses "*trickle down effect*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan.

Proses pertumbuhan ekonomi yang disertai munculnya gejala ketidakmerataan pendapatan itu, terjadi sebagai akibat adanya perbedaan penerimaan pendapatan diberbagai golongan masyarakat. Bilamana proses pembangunan ekonomi tidak diarahkan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan tersebut, maka perbedaan penerimaan ini akan menjadi semakin tajam. Akibatnya akan di jumpai adanya golongan si kaya dan si miskin akan tetap tertinggal. Kesenjangan ini akan semakin parah jika ketika laju pertumbuhan ekonomi makin cepat dan pemerataan pendapatan masih jauh dari apa yang di harapkan. Hal ini akan di rasakan sebagai suatu keadaan yang kurang adil, yang dapat menimbulkan masalah sosial, politik di samping masalah ekonomi yang pasti tercipta.

Masalah pemerataan merupakan masalah yang kompleks, karena berkaitan dengan nilai-nilai sosial sebagai berikut. Pertama masyarakat memandang pemerataan sebagai tujuan yang sudah sewajarnya dicapai karena berimplikasi terhadap moral dan berkaitan erat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial khususnya dan Pancasila umumnya. Kedua, kebijakan yang mendorong pemerataan dan mengurangi kemiskinan, ketika pendapatan lebih merata maka jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berkurang. Kebijakan yang berorientasi pemerataan terutama

investasi pada sumber daya manusia dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Sukirno, 1985:31).

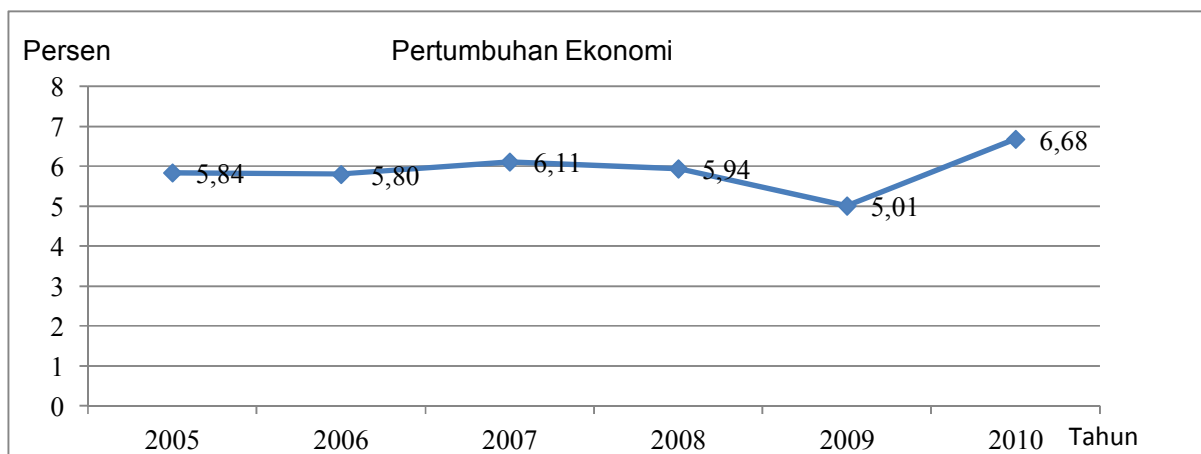
Demikian halnya pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki banyak keunggulan. Salah satu keunggulan dari Provinsi Jawa Timur adalah letak wilayahnya yang cukup strategis sehingga memungkinkan untuk di jadikan sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Indonesia bagian timur. Selain itu Jawa Timur memiliki sarana dan prasarana yang baik, yang tentunya sangat membantu perkembangan ekonomi di Jawa Timur. Dengan demikian jika mencermati pengertian tersebut maka upaya mengharmonisasikan tujuan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang dipilih atau yang dijalankan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah melalui serangkaian kebijakan pembangunan memiliki arti strategis dalam menentukan keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah Jawa Timur, sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, juga memikul tanggung jawab yang besar. Tantangan yang dewasa ini sedang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang di dalamnya juga terdapat keberhasilan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh provinsi Jawa Timur salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2005 hingga tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yakni pada tahun 2005 tumbuh sebesar 5,84 persen, namun pada tahun 2006 sedikit

mengalami penurunan yaitu sebesar 5,80 persen, pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen, namun tahun 2008 mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 5,94 Persen, Penurunan laju pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,01 persen, dan peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 6,68 persen. Untuk memberikan gambaran laju pertumbuhan ekonomi tersebut di provinsi Jawa Timur lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.1.

GAMBAR 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
Periode Tahun 2005-2010 (Dalam Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2005-2010

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto, yaitu merupakan rata-rata dari tingkat pertumbuhan di masing-masing kabupaten/kota dari sembilan sektornya. Artinya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini akan menghambat tingkat perekonomian secara keseluruhan, sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka sektor tersebut mempunyai tingkat

pertumbuhan yang tinggi, sehingga sektor tersebut akan menjadi lokomotif pertumbuhan secara total sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya menjadi lebih besar, untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan di masing-masing kabupaten/kota dapat di lihat pada tabel 1.1.

Berdasarkan tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2005 hingga tahun 2010 mengalami pertumbuhan fluktuatif yang meningkat, pada tahun 2005 wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro sebesar 8,88 persen, berikutnya Kabupaten Gresik dengan nilai sebesar 7,88 persen, dan yang terakhir Kota Surabaya sebesar 7,35 persen. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kota Kediri hanya sebesar 1,58 persen.

Pada tahun 2006 wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Ngawi sebesar 10,03 persen, berikutnya Kabupaten Bojonegoro dengan nilai sebesar 7,05 persen, dan yang terakhir Kabupaten Tuban sebesar 7,05 persen. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kota Kediri hanya sebesar 3,82 persen.

Pada tahun 2007 wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Ngawi sebesar 10,45 persen, berikutnya Kabupaten Lamongan dengan nilai sebesar 6,98 persen, dan yang terakhir kota batu sebesar 6,92 persen. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kabupaten Sampang hanya sebesar 4,86 persen.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2010 Atas Dasar Harga Berlaku 2000 (persen)

No	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Raat-rata
1	Kab. Pacitan	3,97	4,16	5,27	5,34	5,26	6,66	5,11
2	Kab. Ponorogo	4,55	4,81	6,77	5,75	5,01	5,89	5,46
3	Kab. Trenggala	4,36	4,37	5,67	5,66	5,02	6,16	5,21
4	Kab. Tulungagung	5,22	5,63	5,91	5,93	5,25	6,65	5,77
5	Kab. Blitar	5,57	5,06	5,88	6,01	5,05	6,12	5,62
6	Kab. Kediri	3,27	4,72	4,91	4,38	4,28	6,07	4,61
7	Kab. Malang	5,05	5,33	6,10	5,88	5,02	6,57	5,66
8	Kab. Lumajang	5,18	5,05	5,73	5,14	5,04	6,94	5,51
9	Kab. Jember	5,65	5,70	5,99	6,08	5,02	6,16	5,77
10	Kab. Banyuwangi	5,26	5,73	5,84	5,85	5,05	6,26	5,67
11	Kab. Bondowoso	5,40	5,56	5,91	5,32	5,00	5,69	5,48
12	Kab. Situbondo	5,53	5,40	5,76	5,04	5,02	6,89	5,61
13	Kab. Probolinggo	4,75	5,90	5,99	5,84	5,12	6,25	5,64
14	Kab. Pasuruan	6,32	5,81	4,98	5,92	5,02	6,23	5,71
15	Kab. Sidoarjo	6,59	5,13	5,98	4,96	4,41	5,92	5,50
16	Kab. Mojokerto	6,93	5,60	6,11	5,87	5,03	6,87	6,07
17	Kab. Jombang	5,49	5,87	6,54	5,81	5,04	6,65	5,90
18	Kab. Nganjuk	5,64	4,25	5,59	5,99	5,18	6,32	5,50
19	Kab. Madiun	5,53	4,75	5,48	5,26	5,02	5,96	5,33
20	Kab. Magetan	4,85	4,43	5,26	5,07	5,02	5,81	5,07
21	Kab. Ngawi	4,82	10,03	10,43	5,49	5,05	6,19	7,00
22	Kab. Bojonegoro	8,88	7,05	6,48	9,24	6,55	10,97	8,20
23	Kab. Tuban	5,86	7,05	5,82	6,98	5,03	6,30	6,17
24	Kab. Lamongan	5,81	5,48	6,98	6,22	5,31	6,86	6,11
25	Kab. Gresik	7,88	6,94	5,21	6,17	5,96	6,89	6,51
26	Kab. Bangkalan	4,67	4,57	4,58	4,71	4,37	5,47	4,73
27	Kab. Sampang	3,84	4,61	4,86	4,65	4,27	5,40	4,61
28	Kab. Pamekasan	4,99	4,65	4,99	5,59	5,04	5,77	5,17
29	Kab. Sumenep	3,31	4,08	4,99	4,36	4,22	5,51	4,41
30	Kot. Kediri	1,58	3,82	4,28	4,31	4,19	5,99	4,03
31	Kot. Blitar	6,07	6,01	6,61	6,79	5,31	6,66	6,24
32	Kot. Malang	6,67	6,97	6,38	5,98	5,20	6,60	6,30
33	Kot. Probolinggo	6,30	6,52	6,83	6,37	5,02	6,41	6,24
34	Kot. Pasuruan	6,15	6,19	5,86	5,91	5,02	5,99	5,85
35	Kot. Mojokerto	6,08	5,26	5,98	5,71	5,03	6,66	5,79
36	Kot. Madiun	5,94	5,40	6,85	6,90	5,22	6,97	6,21
37	Kot. Surabaya	7,35	6,64	6,89	6,84	5,17	7,47	6,73
38	Kot. Batu	7,32	6,81	6,92	6,96	5,90	7,16	6,85
Jawa Timur		5,84	5,80	6,11	5,94	5,01	6,68	5,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2010

Pada tahun 2008 wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Tuban sebesar 6,98 persen, berikutnya Kota Batu dengan nilai sebesar 6,96 persen, dan yang terakhir Kota Madiun sebesar 6,90 persen. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kota Kediri hanya sebesar 4,61persen.

Pada tahun 2009 wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah kabupaten Bojonegoro sebesar 6,55 persen, berikutnya Kota Batu dengan nilai sebesar 5,90 persen, dan yang terakhir Kota Madiun sebesar 5,22 persen. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kota Kediri hanya sebesar 4,19 persen.

Pada tahun 2010 wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro sebesar 10,97 persen, berikutnya Kota Surabaya dengan nilai sebesar 7,47 persen, dan yang terakhir Kota Batu sebesar 7,16 persen. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kabupaten Sampang hanya sebesar 5,40 persen.

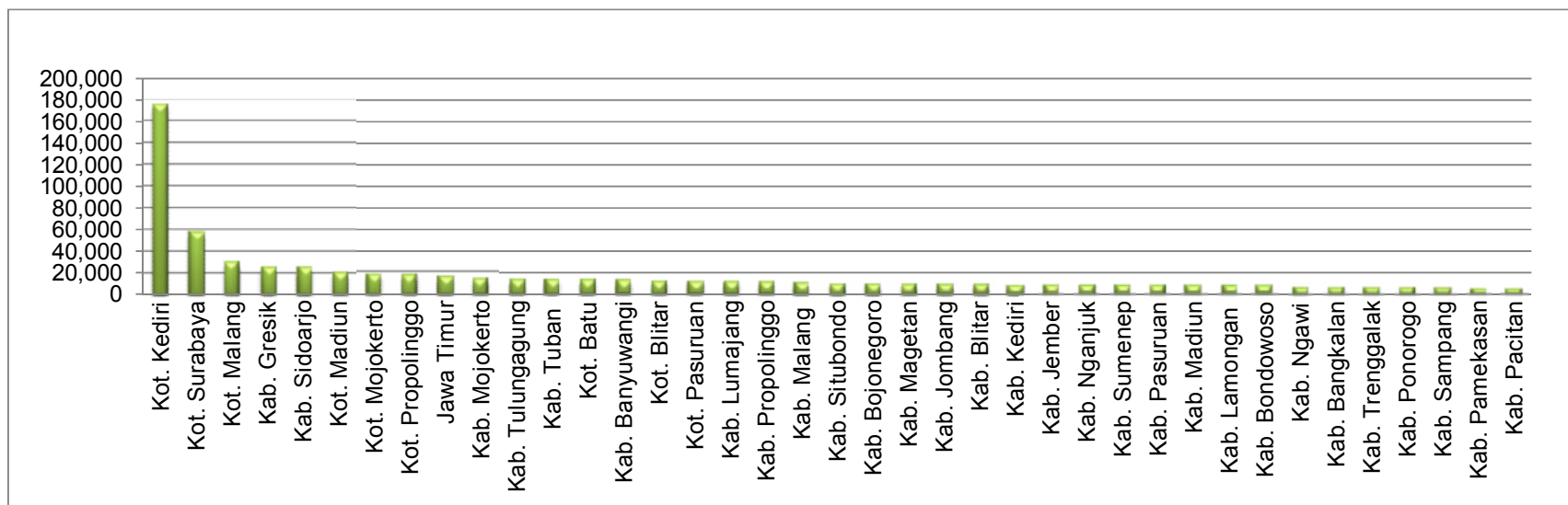
Pembangunan di suatu wilayah, dilakukan tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di samping itu juga tujuan yang tidak kalah pentingnya dari proses pembangunan adalah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih menggalakan kehidupan ekonomi Jawa Timur tentu tidak lepas dari tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan utama tersebut ditempuh

melalui berbagai macam pendekatan. Hal ini tercermin dari lahirnya sebuah regulasi-regulasi yang pro terhadap lapisan masyarakat bawah.

PDRB per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, dimana jika semakin besar PDRB per - kapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya di wilayah tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB per kapitanya semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya di wilayah tersebut.

Gambar 1.2.

Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Se - Jawa Timur (Ribuan) Tahun 2005-2010



Sumber : Sumber dari lampiran 1

Berdasarkan gambar 1.2 PDRB per kapita di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2005 hingga tahun 2010 wilayah kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Kediri dengan rata-rata sebesar 178,150 rupiah, berikutnya Kota Surabaya dengan rata-rata sebesar 61,148 rupiah dan yang terakhir Kabupaten Gresik dengan rata-rata sebesar 26,596 rupiah.

Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita paling rendah adalah Kabupaten Pacitan dengan rata-rata sebesar 5,195 rupiah. Ada beberapa kabupaten/kota PDRB per kapita yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PDRB Jawa Timur per kapita. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di Jawa Timur yang terkonsentrasi pada beberapa kabupaten/kota tertentu yang berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan Jawa Timur.

Selain faktor pemusatan kegiatan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu, kesenjangan pendapatan masyarakat juga diakibatkan oleh persoalan struktural yang terjadi dalam perekonomian, persoalan struktural tersebut antara lain : (1) akses yang tidak sama terhadap teknologi, kredit dan input produktif (2) tingginya tingkat perbedaan konsentrasi kepemilikan modal (Suharto, 2001:16).

Berangkat dari keinginan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap persoalan tersebut maka penulis mengajukan judul penelitian **"Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Per kapita Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2010"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Provinsi Jawa Timur 2005-2010?
2. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur ?
3. Seberapa besar kesenjangan pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2010
2. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2005-2010.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2005-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan informasi yang tersistematis mengenai persoalan ekonomi regional terutama tentang keterkaitan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan per kapita di Jawa Timur.
2. Dapat di gunakan sebagai masukan dalam pembangunan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi.

I.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis hasil, analisis model dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.